

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia menolak *Proliferation Security Initiative*, sehingga akhirnya Indonesia melakukan *hedging* untuk meningkatkan pengamanan di Selat Malaka Periode 2006-2008.

Pada prosesnya, penelitian ini telah menguraikan faktor-faktor yang membuat Indonesia untuk tidak aktif berpartisipasi dalam *Proliferation Security Initiative* yang ditawarkan AS selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Pada kenyataannya, prinsip-prinsip yang diusung PSI sangat bertentangan dengan UNCLOS 1982 yang merupakan payung hukum bagi *littoral state*, termasuk Indonesia dalam menjaga keamanan di Selat Malaka.

Meski Indonesia belum 100% memiliki kemampuan angkatan laut pada negara maritim, namun hal tersebut tidak membuat Indonesia untuk ikut serta dalam PSI. Selain itu, dengan minimnya kualitas dan kuantitas kapabilitas militer Indonesia tidak membuat Indonesia untuk bekerjasama dengan negara diluar *littoral state* dalam bentuk gelar militer selama kurun waktu 2006 hingga 2008.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini telah berhasil mencapai tujuannya yang pertama, yaitu dalam menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membuat Indonesia menolak *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dengan adanya aturan baku dari UNCLOS 1982 mengenai pengaturan keamanan di Selat Malaka.

Selain itu, penelitian ini juga berhasil mencapai tujuannya yang kedua dalam menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memilih strategi *hedging* di Selat Malaka selama periode 2006 hingga 2008. Tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dengan kondisi geografis Selat Malaka dan fungsi angkatan laut yang dimiliki Indonesia. Merujuk pada kondisi geografis, seharusnya Indonesia sudah memiliki fungsi angkatan laut seperti negara maritim. Namun, hal tersebut belum tercapai sepenuhnya. Kecenderungan fungsi angkatan laut Indonesia lebih

kepada *continental powers*. Tentu saja hal ini memengaruhi pola *command of the sea* Indonesia di Selat Malaka.

Seiring dengan tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini telah berhasil menguraikan pembuktian dari tiga hipotesis yang disusun pada bagian awal penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa, pertama, Indonesia memilih strategi *hedging* dalam rangka untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka selama periode 2006 hingga 2008. Kedua, yaitu strategi *hedging* yang dilakukan Indonesia, yaitu dengan mengumpulkan kekuatan melalui kerjasama dengan *littoral state* maupun *user state* selama periode 2006-2008. Ketiga, alasan Indonesia melakukan *hedging* karena lemahnya kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka selama periode 2006-2008.

Peningkatan keamanan di Selat Malaka dapat dinilai secara kualitas dan kuantitas. Selama kurun waktu 2006 hingga 2008, Indonesia secara aktif melakukan berbagai macam bentuk pengamanan di Selat Malaka yang cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari gelar operasi dan gelar pangkalan oleh Indonesia secara mandiri, Indonesia bersama Singapura dan Malaysia, dan Indonesia bersama *user states*. Peningkatan keamanan tersebut dapat dilihat pada semakin berkurangnya jumlah *armed robbery* (pembajakan) di Selat Malaka. Peningkatan keamanan yang dilakukan Indonesia, tidak memihak pada salah satu pihak, tidak hanya Indonesia dengan *littoral state*, atau hanya Indonesia dengan *user state*.

Oleh karena itu, Indonesia memilih berada di tengah-tengah, dengan melakukan *hedging* dalam rangka peningkatan keamanan di Selat Malaka. Selama kurun waktu 2006-2008, Indonesia telah secara aktif melakukan lima patkor dengan *littoral state* dan juga negara di kawasan regional, seperti India dan Thailand. Hal tersebut juga didukung oleh tujuh konsep kerjasama pertahanan di Selat Malaka. Namun, di sisi lain, Indonesia juga tidak memandang sebelah mata akan bantuan yang ditawarkan oleh negara-negara pengguna selat seperti AS, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Australia. Pasalnya, Indonesia tetap menerima bantuan dari *user states* dalam bentuk teknis/ teknologi, bukan gelar militer. Secara keseluruhan, ada 16 kegiatan yang menghubungkan Indonesia dengan *user state*, baik itu dalam bentuk tawaran kerjasama pertahanan militer, teknis atau

sekedar pernyataan dalam suatu kunjungan. Namun, tidak semua tawaran tersebut diterima Indonesia, pasalnya Indonesia tidak menerima tawaran kerjasama dalam bentuk gelar militer. Sikap Indonesia yang demikian, berada di tengah-tengah dengan menerima dan mempertimbangkan semua tawaran kerjasama yang datang, membuat Indonesia berada dalam posisi *hedging* dalam rangka peningkatan keamanan di Selat Malaka periode 2006-2008.

Strategi *hedging* yang dilakukan Indonesia, yaitu dengan mengumpulkan (*enmeshing*) kekuatan melalui kerjasama dengan *littoral state* maupun *user state* selama periode 2006-2008. Dalam hal ini Indonesia terlihat berusaha dengan mengumpulkan kekuatan dari kerjasama dengan *littoral state* dan juga *user state*, seperti Cina, AS, Jepang, Korsel, India dan Thailand. Pasalnya, Indonesia memiliki keterbatasan dalam *power* yang dapat ditilik pada kapabilitas militer. Indonesia tidak hanya bekerjasama dengan *littoral state* lainnya. Indonesia tidak memilih untuk bergabung dengan AS saja, terutama melalui PSI. Dengan ketidakikutsertaannya ke dalam PSI menandakan bahwa Indonesia telah melakukan *bandwagoning*. Tentunya dalam hal ini menolak untuk bergabung dengan kekuatan besar yang diusung AS.

Indonesia juga tidak memilih bekerjasama dengan negara besar pengguna selat saja, misalnya Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, Thailand atau India. Namun, Indonesia melakukan ketiga hal tersebut secara serentak, secara bersamaan. Bahkan, Indonesia berusaha untuk menggabungkan semua kekuatan yang ada dengan mengumpulkannya menjadi satu dalam rangka meningkatkan keamanan di Selat Malaka Periode 2006-2008. Hal ini semakin terasa meningkat, terutama setelah datangnya tawaran PSI di tahun 2006.

Di sisi lain, alasan Indonesia melakukan *hedging* karena lemahnya kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka selama periode 2006-2008. Selama kurun waktu tersebut, kapabilitas militer Indonesia tidak mengalami perubahan, terutama untuk matra laut. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perubahan yang signifikan akan anggaran pertahanan dengan kebutuhan alokasi anggaran pertahanan, terutama untuk matra laut. Pasalnya, kebutuhan alokasi anggaran untuk matra laut setiap tahunnya semakin meningkat. Namun, hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan terhadap anggaran pertahanan untuk matra laut.

Selain itu itu, dipandang dari segi *manpower* dan alat utama sistem persenjataan, Indonesia juga masih memiliki kekurangan, terutama dalam matra laut. Pasalnya, kualitas dan kuantitas *manpower* dan alutsista Indonesia selama kurun waktu 2006 hingga 2008 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan, pemerintah Indonesia dikala itu dengan terang-terangan meminta bantuan teknis dan teknologi.

4.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis penelitian ini menekankan bahwa *power* mutlak diperlukan dalam meningkatkan keamanan. Oleh karena itu, antara konsep *power* dan *security* tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini, *power* mutlak diperlukan untuk menciptakan *security* (keamanan). Begitu juga sebaliknya, demi menciptakan keamanan, maka negara akan berjuang untuk mendapatkan *power*. Tentunya, hal tersebut juga berlaku bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka sejalan dengan *Defensive Realists*. Sedangkan, tawaran PSI yang diusung AS merupakan *Offensive Realists* dalam rangka untuk mempertahankan hegemoni, terutama di Selat Malaka. Pasalnya, demikian banyak *user state* yang berusaha ikut mengamankan Selat Malaka.

Namun, kajian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini lebih banyak membahas mengenai usaha yang dilakukan negara besar (maju) demi mendapatkan *power* terhadap keberadaan negara besar (maju) lainnya di kawasan, terutama dalam hal ini antara Amerika Serikat dan Cina. Demikian sebaliknya. Pada kenyataannya, masih jarang literatur yang membahas mengenai usaha negara berkembang, seperti Indonesia dalam meningkatkan *power* demi terciptanya keamanan maritim di wilayah yang digunakan secara internasional, seperti halnya Selat Malaka.

Melalui tesis ini, pemikiran tersebut berusaha untuk dikembangkan dan dianalisis dengan menguraikannya sesuai dengan *command of the sea* yang dilakukan angkatan laut Indonesia. Lalu hal tersebut disinkronisasikan dengan kapabilitas militer yang dimiliki Indonesia, sehingga muncul keluaran akhir mengenai usaha yang dilakukan Indonesia demi terciptanya keamanan di Selat

Malaka. Usaha yang dilakukan Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan menjadi *balancing*, *bandwagoning* atau *hedging*.

Berdasarkan data dan fakta yang dihimpun, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa usaha yang dilakukan Indonesia terhadap pengamanan di Selat Malaka sebagai penolakan PSI pada periode 2006 hingga 2008 memiliki kecenderungan pada salah satu strategi tersebut. Dengan menganalisisnya melalui kondisi geografis, fungsi angkatan laut, usaha (operasi militer) yang dilakukan dan kapabilitas militer yang dimiliki, maka didapatkan Indonesia melakukan *hedging* terutama dengan *enmeshing* (pengumpulan) kekuatan (*power*) di kawasan.

Oleh karena itu, dengan minimnya literatur yang membahas usaha yang dilakukan negara berkembang, termasuk Indonesia dalam memperoleh keamanan maritim pada jalur pelayaran internasional, maka sangat diharapkan adanya pengembangan teoritis, bahkan pembaharuan mengenai hal tersebut. Sehingga secara khusus dapat memperkaya pendekatan teoritis yang dipakai negara berkembang dalam memperjuangkan *power* demi terciptanya *security*. Selain itu, juga dapat mengembangkan kajian strategis dan pertahanan dan hubungan internasionalnya pada umumnya.

4.3 Implikasi bagi Indonesia

Berdasarkan data dan fakta yang dihimpun, dapat disimpulkan bahwa dengan ditolaknya PSI oleh Indonesia sebagai negara yang memiliki keterbatasan kapabilitas militer terutama dalam hal keamanan maritim, justru tidak membuat Indonesia kehilangan *power* dalam meningkatkan keamanan di Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional. Dengan banyaknya tawaran kerjasama pertahanan dan bantuan dari *user state*, justru membuat Indonesia untuk meningkatkan *power* melalui *hedging*.

Sebaliknya, Indonesia semakin gencar menghimpun kekuatan dari berbagai penjuru, terutama di kawasan regional. Negara-negara pengguna pun cenderung memahami ketaatan Indonesia pada UNCLOS 1982 dengan menghormati wilayah kedaulatan Indonesia di Selat Malaka. Maka dalam hal ini, banyak tawaran/ bantuan yang datang tidak lagi dalam bentuk gelar militer,

melainkan teknologi/ teknis. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Indonesia telah mengundang berbagai simpati negara di dunia. Keinginan negara-negara pengguna untuk ikut serta dalam pengamanan di Selat Malaka juga menimbulkan dilema bagi Indonesia, di satu sisi dengan tawaran kerjasama tersebut, maka Indonesia dianggap belum mampu melakukan pengamanan di Selat Malaka. Namun, di sisi lainnya tersirat bahwa negara pengguna menghargai dan percaya pada Indonesia, sehingga ingin menjalin kerjasama.

Namun demikian, meski hanya bantuan teknis, Indonesia diharapkan tetap dapat memilah dan memilih dengan cermat setiap tawaran yang datang padanya. Selain itu, dengan adanya bantuan *power* dari negara lain, lantas tidak membuat Indonesia terlena dengan bantuan tersebut. Pасalnya, mengingat situasi dan kondisi internasional yang cenderung berubah-ubah, maka ada baiknya jika Indonesia tidak memiliki ketergantungan pada satu/ beberapa negara.

Diharapkan selama beberapa tahun ke depan, Indonesia sudah memiliki angkatan laut dengan kemampuan pada negara maritim sesungguhnya. Sehingga, bukan saja Selat Malaka yang dapat dilindungi, tapi juga berbagai jalur perdagangan internasional lainnya yang berada di wilayah Indonesia.

4.4 Rekomendasi

Bagi penelitian lanjutan mengenai tema strategi pertahanan maritim terhadap adanya tawaran kerjasama pertahanan, setidaknya dapat direkomendasikan beberapa hal berikut ini yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Dipandang dari segi teoritis, maka sudah sewajarnya jika diperlukan analisis yang mendalam mengenai *command of the sea*, terutama jika dikaitkan dengan *sea power*. Ada baiknya, pembahasan tidak sebatas di permukaan, tapi juga secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan dapat diketahui lebih mendalam mengenai strategi pertahanan maritim suatu negara dengan dianalisis berdasarkan kondisi geografis dan kapabilitas angkatan lautnya secara menyeluruh.

Selain itu, alangkah baiknya jika dapat dibuat suatu pemetaan mengenai strategi pertahanan maritim Indonesia di Selat Malaka secara lebih spesifik.

Tentunya dengan berpijak pada kebijakan Indonesia terhadap pengamanan di Selat Malaka.

Secara metodologis, terutama berkaitan dengan pengumpulan data dan fakta, sesungguhnya diperlukan suatu ‘bank data’ yang lebih mendalam mengenai strategi pertahanan maritim Indonesia. Selain itu, alangkah lebih baiknya, jika kebijakan strategi pertahanan maritim Indonesia di Selat Malaka yang masih dirumuskan untuk cepat dirampungkan. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman dalam tindak-tanduk Indonesia mengamankan Selat Malaka. Di sisi lain, kelengkapan data terutama akan orisinilitas data dapat dilengkapi dari dokumen-dokumen resmi yang dimiliki pemerintah. Pada penelitian ini, dapat ditelusuri dokumen-dokumen resmi tersebut, tapi tidak semuanya didapatkan. Pasalnya, data-data tersebut tidak tersip dengan baik. Bahkan, memang ada yang tidak untuk dipublikasikan.

Selanjutnya berkaitan dengan pengolahan data yang alangkah baiknya jika dapat dilakukan secara kuantitatif. Meski pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri dokumen, tapi pengolahan secara kuantitatif mutlak diperlukan. Hal tersebut mengingat akan pengujian validitas data.